



MAKALAH KAJIAN KEBIJAKAN

EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN UNCAC DI INDONESIA

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

*Anggota Pendiri Kajian Antikorupsi,
Asian Association for Public Administration*

Dipresentasikan Pada *Media Briefing* Hari Antikorupsi Internasional,
ICW 8 Desember 2013

A. HASIL KINERJA KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

- ❑ Indonesia memiliki reputasi yang buruk dalam hal korupsi dan pemberantasan korupsi (Bank Dunia).
- ❑ Dari seluruh/keenam indikator pemerintahan/*governance indicators* (Kaufmann, D. et all, 2011) —*voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption*— *percentile rank* RI di bawah 50 (0 - 100). Hanya tahun 1996 *percentile rank* RI dalam hal efektifitas pemerintahan di atas 50.
- ❑ Sejak 1995 hingga 2013 RI selalu dipersepsikan sebagai salah satu negara terkorup berdasar IPK TI. Bahkan tahun 1995 RI menduduki ranking I sebagai negara terkorup.
- ❑ GCB Indonesia 2013 36%.
- ❑ Karena itu, dari berbagai indikator tersebut implementasi kebijakan RB dianggap gagal atau kurang efektif dalam mencapai tujuannya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Definisi

- ❑ Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai “proses interaksi antara perumusan tujuan kebijakan dan tindakan untuk mencapai tujuan itu” (Pressman and Wildavsky 1973: xv).
- ❑ Mazmanian and Sabatier (1989:4) berpendapat implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman tentang peristiwa, proses dan kegiatan setelah suatu kebijakan diformulasikan dan program diadopsi, termasuk mempelajari perilaku mereka yang terlibat dalam proses itu khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- ❑ Proses implementasi ini distrukturisasi melalui jaringan kebijakan (*policy network*), yang terdiri dari kumpulan korporasi, pemerintah, dan asosiasi, atau yang diistilahkan dengan “struktur implementasi” (Hjern 1993:250).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pendekatan Strategi dan Analisis Implementasi Kebijakan: Model Implementasi *Top Down* vs *Bottom Up*

- ❑ Fokus awal: *Top Down* memulai analisis dari keputusan pemerintah/PUU, sedangkan *Bottom Up* dari jaringan implementasi lokal.
- ❑ Tahapan implementasi: *Top Down* membedakan dengan jelas antara proses formulasi dan implementasi kebijakan, sedangkan *Bottom Up* tidak.
- ❑ Kriteria evaluasi: *Top Down* memfokuskan sejauhmana tujuan kebijakan/PUU dicapai, sedangkan *Bottom Up* tidak jelas/biasanya kriteria apapun yang dipilih oleh analis sesuai isu kebijakan.
- ❑ Fokus keseluruhan: *Top Down* memfokuskan bagaimana kita mengendalikan sistem untuk mencapai tujuan kebijakan, sedangkan fokus *Bottom Up* pada interaksi strategik diantara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan.

KONDISI YANG DIPERLUKAN BAGI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT MODEL *TOP DOWN*

- Gunn (1978) menyarankan syarat esensial bagi efektifitas implementasi kebijakan:
 1. Lingkungan eksternal yang kondusif.
 2. Dukungan sumber daya program yang memadai
 3. Sumber daya program yang layak tersedia pada setiap tahap implementasi.
 4. Teori kausal kebijakan yang memadai.
 5. Hubungan kausal langsung.
 6. Adanya badan independen tunggal yang bertanggung jawab atas kesuksesan implementasi kebijakan.
 7. Pemahaman dan persetujuan yang menyeluruh atas tujuan kebijakan.
 8. Tahapan tugas rinci yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaksana.
 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 10. Ketaatan penuh atas perintah pihak yang berwenang/pimpinan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- ❑ Berdasarkan kajian literatur faktor efektifitas implementasi dapat dikategorikan ke dalam lima tipe, yaitu: desain kebijakan, politik, institusional, manajerial, dan sosial.
 1. *Desain kebijakan*, menilai bagaimana desain/substansi kebijakan mempengaruhi efektifitas implementasi.
 2. *Politik*, mengatribusikan efektifitas implementasi pada institusi dan kepemimpinan politik.
 3. *Institusional*, efektifitas implementasi dipengaruhi oleh kerangka institusional.
 4. *Manajerial*, menentukan pengaruh pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada efektifitas implementasi.
 5. *Sosial*, mengatribusikan efektifitas implementasi pada tingkat partisipasi dan kontrol masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.

IV. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Indonesia

- ❑ Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
- ❑ Sasaran yang ingin dicapai dari reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Lessons Learned dari Kasus Grand Corruption

Kasus-kasus

1. Bank Century
2. Hambalang
3. Wisma Atlet
4. SKK Migas, dll.

Lessons Learned dari Kasus Grand Corruption

- ❑ Pengaturan/revisi pasal suap dan gratifikasi, termasuk agen.
- ❑ Transparansi dan pengawasan atas pemberian FPJP.
- ❑ Integritas rekrutmen, seleksi, promosi dan pemberhentian pejabat publik, eg. MK, KPK, Kapolri, Jaksa Agung dll.
- ❑ Penguatan pengawasan.
- ❑ Independensi lembaga antikorupsi.
- ❑ Perlindungan KPK dari *legislative attack* dengan menjadikannya sebagai *constitutional body*.

Gerakan Antikorupsi 2014

- ❑ Rawan korupsi politik/korupsi politik akan semakin meningkat.
- ❑ KPK rawan intervensi politik.
- ❑ KPK dan gerakan antikorupsi akan menghadapi pelumpuhan yang lebih sistematis.
- ❑ Demokrasi Indonesia akan gagal bila tren korupsi terus berlanjut.
- ❑ Gerakan antikorupsi/kekuatan masyarakat sipil harus melakukan tekanan yang lebih kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi dan memastikan terpilihnya Presiden dan pejabat publik yang punya komitmen kuat pada pemberantasan korupsi.